

HARIAN
UNTUK UMUM

TERBIT SEJAK
01 MARET 2011

PENDIRI:
Ardi, S.Si, Apt

Baubau Post

erani Beda - Kritis, Lugas, Independen

Baubaupost.com
Rabu
17 Januari 2024

Eceran Rp 5000

Berlangganan Rp 100.000/ bulan

Info Langganan dan Iklan HP/WA: 082160543989

Pj Walikota Baubau Minta Dokter dan Dokter PTT di Puskesmas Se-Kota Baubau Harus Bekerja Sama Mengejar Ketertinggalana



Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi bertemu dokter dan dokter PTT se Kota Baubau di Puskesmas Betoambari

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) sekaligus bertemu dengan dokter PTT se-kota Baubau di Pukesmas Betoambari, Senin sore (15/1/2024). Menurut Dr Muh Rasman, Kunker ini merupakan rasa syukur berkesempatan datang berkunjung. "Saya tidak akan banyak lagi dikantor dan akan main dilapangan."

Pemprov Sultra Target Sangat Baik Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024



Pewarta: Mashuri

KENDARI, BP-Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara menargetkan akan mencapai predi-

kat sangat baik, untuk penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Tahun 2024. Hal ini diungkap-

kan Sekretaris Daerah Provinsi Sultra, Drs H Asrun Lio MHum PhD, yang didampingi beber-

Lanjutkan ke Hal: 7

Triwulan pertama di-tahun 2023, saya memang harus berada di kantor untuk mengejar ketertinggalan saya dan

Lanjutkan ke Hal: 7

Pemkot Sertakan Modal Daerah Tanah dan Bangunan ke BPD Bank Sultra Rp 13 Miliar Lebih



Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Sejak akhir tahun 2021, PT. Bank Pembangunan

Daerah (BPD) Sulawesi Tenggara (Sultra) telah meminta kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau untuk melaku-

kan penambahan penyertaan modal baik berupa uang maupun barang (aset). Namun baru pada

Lanjutkan ke Hal: 7

Buton Masuk Prioritas Kementerian ATR/BPN Bantu Buton dalam Penyusunan RDTR dan KHLS



Peliput : Rahman

BUTON, BP-Pemerintah Kabupaten Buton menjadi salah satu daerah dari 4 (empat) kabupaten di Sulawesi Tenggara dan 63 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapatkan bantuan penyusunan RDTR dan KHLS dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional.

Masuknya Kabupaten Buton sebagai salah satu kabupaten dari 63 kabu-

paten/kota di Indonesia yang mendapatkan bantuan penyusunan RDTR dan KHLS dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. menandakan bahwa Kabupaten Buton merupakan salah satu daerah yang menjadi prioritas perhatian pemerintah pusat karena memiliki banyak potensi di antaranya potensi kelautan dan perikanan, perkebunan dan

Lanjutkan ke Hal: 7



Andina Latief, SKM
DIREKTUR

SEGENAP PIMPINAN, REDAKSI, & KARYAWAN PT FAREN GRAFIKA
PENERBIT SURAT KABAR HARIAN (SKH) BAUBAU POST (www.baubaupost.com)

Mengucapkan :

Terimakasih Kepada Dewan Pers Yang Telah Menetapkan SKH Baubau Post (www.baubaupost.com) Sebagai Media Terverifikasi per Tanggal 30 Desember 2022



Pj Walikota Baubau Minta Dokter dan Dokter PTT di Puskesmas Se-Kota Baubau Harus Bekerja Sama Mengejar Ketertinggalan

memahami wilayah, sekaligus saya mencoba melakukan penyesuaian baik dari pola kerja maupun penyesuaian target dan amanah yang saya laksanakan, ujarnya.

Secara spesifik ungkap orang nomor satu di Kota Baubau ini, Puskesmas adalah ujung tombak, sama seperti Posyandu dan guru-guru yang ada di wilayah dan merupakan ujung tombak dalam menangani permasalahan dasar atau layanan dasar pemerintahan.

Sebagai ujung tombak maka harus menyiaipkan waktu dan harus menjadi bagian dari solusi bukan menjadi masalah. Sehingga, jadilah pemecah masalah yang dihadapi bukan membuat ma-

salah baru atau menu-larkan masalah baru.

Soal dokter PTT, Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman mengaku, pertemuan dengan para dokter PTT dikarenakan pihaknya mengetahui persis setiap dokter memiliki latar belakang yang berbeda-beda, lingkungan berbeda. Kemudian, jika berbeda lingkungan, berbeda tipe maka apabila ada masalah akan memiliki banyak solusi untuk memecahkan sebuah permasalahan.

"Mengapa saya ingin mengenal semua dokter yang tersebar di 17 Puskesmas yang ada di Kota Baubau, pertama bangun kerjasama jangan memandang kita dari mana sekarang saatnya kita kerja bersama tidak boleh ada yang lemah, tidak boleh tertinggal

jauh yang lainnya sudah maju melangkah, karena kekuatan tim terletak di orang yang paling lemah dan itu adalah kekuatan kita, jika ada yang seperti itu maka segera tarik, segera selesaikan masalahnya," ujarnya.

Dr Muh Rasman pada Kunker dan pertemuan dengan dokter PTT itu juga menyampaikan untuk melakukan komunikasi dengan dirinya maka ada tiga media untuk melakukan komunikasi diantaranya adalah Facebook, Instagram dan Twitter. Oleh sebab itu, jika ada yang ingin disampaikan langsung agar disampaikan di tiga media tersebut meskipun tidak perlu bertemu untuk melakukan komunikasi.

Apalagi, semua kepala dinas juga su-

dah diwajibkan untuk melakukan komunikasi lewat zoom meeting. Jadi komunikasi terbuka setiap saat artinya tidak ada masalah yang timbul tidak dikomunikasikan pada saat itu juga.

Sementara itu, untuk Puskesmas Betoambari yang lokasinya berdekatan dengan laut, Dr Muh Rasman meminta agar segera dicarikan solusi untuk menindaklanjuti dengan pembuatan beton pemecah ombak. Karena itu, Dinas Kesehatan segera mencarikan solusi karena APBD Baubau sangat terbatas maka siapkan dokumennya kalau memang proposal siap untuk bergerak secepat mungkin apakah harus ke Provinsi Sultra atau ke pusat. (*)

Pemprov Sultra Target Sangat Baik Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2024

apa pimpinan OPD lingkup Pemprov Sultra, saat menerima kunjungan Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo, Senin (15/1), bertempat di Ruang Kerja Sekda Sultra.

Dalam pertemuan tersebut, Sekda Sultra didampingi sejumlah pimpinan OPD, diantaranya Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Sultra, Yusmin, Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Sultra, Parinringi, dan Direktur RSUD Bahteramas Sultra, dr Hasmudin.

Keseriusan mencapai target tersebut,

ditandai dengan kesediaan Pemprov Sultra untuk dilakukan pendampingan secara teknis oleh ORI Perwakilan Sultra, dalam rangka perbaikan terhadap sejumlah aspek, yang nilainya dianggap masih kurang.

Sekda Sultra menearangkan, target tersebut ditetapkan, selain akan dilakukan pendampingan teknis oleh ORI Perwakilan Sultra, juga mengingat Pemprov Sultra pernah meraih predikat hijau, sehingga tinggal melakukan evaluasi terhadap sejumlah OPD yang menjadi sampel atau perwakilan penilaian.

"Penetapan target ini, selain sebagai percepatan penilaian kualitas

pelayanan publik di Pemprov Sultra, juga bagaimana memenuhi serta melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020, tentang RPJM Tahun 2020-2024, dalam rangka mendorong penyelenggara pelayanan publik, sesuai dengan amanat UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik," harapnya.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo menerangkan, jika Pemprov Sultra memiliki hasil penilaian kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Tahun 2023 dalam kategori sedang atau kuning.

"Pada tahun 2021, nilai kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik Pemprov Sultra tinggi, namun tahun berikutnya menjadi turun. Salah satu penyebab karena adanya beberapa OPD yang memiliki nilai kurang, sehingga sangat mempengaruhi nilai akumulatif," tuturnya.

Untuk itu, Pemprov Sultra perlu memperhatikan empat dinas yang akan menjadi penilaian ORI Perwakilan Sultra, yakni Dinas Penanaman modal dan PTSP, Dikbud Sultra, dan RS Bahteramas, dan Dinas Sosial Provinsi Sultra. (*)

Pemkot Sertakan Modal Daerah Tanah dan Bangunan ke BPD Bank Sultra Rp 13 Miliar Lebih

2024 ini Pemkot Baubau akan melakukan penyertaan modal yaitu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di belakang kantor PT. BPD Sultra yang akan digunakan untuk rumah dinas kepala BPD Sultra cabang Baubau dan tanah disebelah kantor Telkom Baubau yang akan digunakan untuk mendirikan Drive Thru ATM.

Demikian Pidato Pj Wali Kota Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si terkait rancangan peraturan daerah ten-

tang penyertaan modal daerah kepada perseoran terbatas BPD Sultra Senin (15/1/2024) bertempat di Kantor DPRD Kota Baubau.

Menurut Dr Muh Rasman Manafi, penyertaan modal pemerintah daerah yang berasal dari APBD dan barang milik daerah. Konsekuensi dari penyertaan modal pemerintah daerah yang dilakukan dalam bentuk uang dan barang milik daerah merupakan bentuk investasi pemerintah daerah pada badan

usaha BUMD dengan mendapatkan hak kepemilikan, sehingga terjadi pengalihan kepemilikan uang dan barang milik daerah yang semula menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada BUMD.

Dikatakan, berpedoman pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 77 tahun 2020 tentang pe-

doman teknis pengelolaan keuangan daerah, maka penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Sultra berdasarkan pada prinsip sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah, tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan

Buton Masuk Prioritas Kementerian ATR/BPN Bantu Buton dalam Penyusunan RDTR dan KHLS

pariswisata serta potensi aspal alam terbesar di dunia.

Demikian dikatakan Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, MSi pada Forum Ekspose Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan Penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) di Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di salah satu hotel di Kendari, Selasa, 19 Desember 2023.

"Jika kita mengacu pada data dan informasi dari Kementerian Investasi / Badan Koordinasi Penanaman Modal bahwa di Kecamatan Lasalimu memiliki potensi investasi sebesar Rp 7,1 triliun dengan cadangan Aspal sebesar 662 juta ton. Hal ini tentu menjadi berkah sekaligus tantangan," kata Pj. Bupati Buton..

Menjadi berkah kata Sekwan DPRD Provinsi Sultra ini jika hilirisasi Aspal Buton yakni mengolah bahan baku batuan Aspal Alam Buton menjadi aspal Buton ekstraksi untuk mensubstitusi aspal impor dapat diwujudkan. Karena hal ini dapat menggerakkan dan meningkatkan roda perekonomian lokal dan nasional.

Sedangkan tantangan adalah pemanfaatannya adalah potensi dan sumber daya alam aspal Buton yang ada di Kabupaten Buton harus berorientasi pada konservasi lingkungan untuk memitigasi potensi terjadinya bencana lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia.

Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada konservasi lingkungan berperan strategis untuk memitigasi bencana lingkungan agar masyarakat memiliki ruang hidup yang aman dari potensi bencana lingkungan serta lebih sehat dari polusi dan kerusakan lingkungan," katanya.

Dikatakan Pj. Bupati Buton, Pemerintah telah merespon hal tersebut dengan menerbitkan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja dalam pasal 6 mengamanatkan bahwa untuk peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha diperlukan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang.

Dan juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46

tahun 2016 tentang tata cara penyelenggaraan kajian lingkungan hidup strategis, telah mengamanatkan bahwa seluruh kebijakan atau program pemerintah, baik pusat maupun Daerah, yang menimbulkan dampak dan risiko terhadap lingkungan, sumber daya alam, keberlanjutan kehidupan masyarakat, serta kesehatan dan keselamatan manusia perlu dilengkapi dengan dokumen KHLS," katanya.

Tujuannya adalah untuk menyediakan kajian analisis dampak dan risiko yang berpotensi timbul dari kebijakan pembangunan. Klhs berperan penting untuk menyediakan rekomendasi alternatif agar pelaksanaan kebijakan atau program tersebut tidak merusak ekosistem lingkungan hidup.

Saya sangat yakin dan percaya bahwa Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) dan penjaminan Kualitas Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KHLS) RDTR Kecamatan Lasalimu yang telah disusun ini yang telah melalui serangkaian tahapan kegiatan dan melibatkan tenaga ahli, para akademisi, dan juga peran aktif masyarakat melalui penjangkaran saran dan masukan dapat mendorong peningkatan investasi, ekonomi serta daya saing Kabupaten Buton di masa yang akan datang.

Selaku Pj. Bupati Buton saya mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional Direktorat Jenderal Tata Ruang atas bantuan teknis penyusunan RDTR Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton. Juga ucapan terimakasih kepada seluruh pihak yang terlibat khususnya kantor wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Sulawesi Tenggara, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tenggara, Kantor Pertanahan Kabupaten Buton, Tim Pokja / Tim Penyusun, Konsultan RDTR dan KHLS Kecamatan Lasalimu Kabupaten Buton.

Turut hadir pada kesempatan itu, Kadis PUPR Kabupaten Buton, M. Wahyudi, ST, MSi, Inspektur, Drs. Gandid B Sioni, Kadis Pertanian, Ma'mul Jamal, SP, MSi, Kadis Ketaopang, La Lodi, SP, MSi, Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan daerah, Wa Ode Sitti Raemuna, SE, Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, Nurul Kudus Tako, ST, MSi, Kadis Perindustrian, Ir. Sadius, MSi, Kadis Lingkungan Hidup, Drs. Salmi, Kabag Hukum, Fakhruddin M Satu, SH, MH. (*)

bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat dan meningkatkan pendapatan asli daerah.

Orang nomor satu di Kota Baubau ini memberikan gambaran umum pendapatan deviden dan pembiayaan daerah yakni sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2022 berdasarkan hasil audit BPK-RI, Yaitu PAD yang bersumber dari pendapatan hasil pengelolaan yang dipisahkan (deviden), total 79 milyar 486 juta 608 ribu 76 rupiah, yang tercatat sebagai Silpa dan digunakan untuk membiayai be-

lanja daerah dan /atau menutup defisit.

Sedangkan penyer-taan modal daerah kepada PT BPD Sultra, total sebesar 25 milyar rupiah. Oleh karena batasan jumlah penyertaan modal daerah kepada PT. BPD Sultra sudah terpenuhi maka Pemkot Baubau mengajukan rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada perseoran terbatas Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara agar kedepannya dapat dilakukan penambahan penyertaan modal daerah.

Dan berdasarkan hasil penilaian dari KPKNL Provinsi Sulawesi Tenggara, tanah dan bangunan

tersebut bernilai sebesar 13 milyar 731 juta 64 ribu rupiah yang selanjutnya akan dicatat dan diakui sebagai penyertaan modal pada PT. BPD Sultra cabang Baubau, dengan harapan akan menambah atau menghasilkan PAD berupa penerimaan deviden setiap tahunnya. Oleh karena itu saya berharap rancangan peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tenggara dapat segera ditetapkan menjadi peraturan daerah. Sehingga pemerintah Kota Baubau dapat melakukan penambahan penyertaan modal," ujarnya. (*)

Rabu, 17 Januari 2024

Mantapkan Pemilu 2024, Pj Gubernur Sultra ABR Rakor Bersama KPUD se Sultra



Laporan: Masuri

KENDARI, BP-Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., hadir dalam rangka Rapat Koordinasi (Rakor) persiapan penyelenggaraan pemilu 2024 di Hotel Claro Kendari, (Senin, 15 Januari 2024)

Hadir dalam Kegiatan tersebut, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda Sultra, Sekretaris Daerah (Sekda) Sultra, Ketua KPU Prov. Sultra, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Prov. Sultra, Para Bupati/Walikota se-Sultra atau yang diwakili, Para Kapolres, Para Ketua KPU Kab/Kota se-Sultra, Bawaslu dan Pejabat terkait

Sambutan dan Arah-an Pj. Gubernur Sultra, sekaligus membuka secara resmi kegiatan Rakor tahapan pemilu menuju hari pemungutan suara, pada tanggal 14 Februari 2024 Pemprov. Sultra, KPU Provinsi, KPU Kab/Kota, Kapolres, Dandim serta Stakeholder lainnya se-Sultra, semoga kegiatan ini dapat berjalan baik dan lancar

Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan yaitu pertama kasih atas kehadiran kita pada hari ini dan kita sepakat, jadikan pertemuan ini yang bermanfaat sehingga kita bicarakan hal-hal yang signifikan, serta esensinya adalah bagaimana proses dan hasilnya baik dan benar, yang terpenting dari semua itu, disamping kita

melakukan upaya-upaya ataupun effort, tentu diawali dengan komitmen moral kita penyelenggaraan pemilu di tempat kita, aman, damai, kondusif tanpa adanya kejadian yang menonjol, sehingga komitmen moral kita seperti itu tanamkan dalam kerangka berpikir kita, di dalam frame kita lakukan upaya-upaya, kemudian nanti kita lihat komitmen moral termasuk langkah-langkah yang kita laksanakan diawali dengan perencanaan yang baik, sehingga tidak akan pernah menghinai hasil

Apa bila kita menghitung mundur, 29 hari lagi menuju pemilu, hal ini sangat penting dalam menyosong proses demokrasi, yang jadi fondasi kuat bagi kelangsungan negara dan pemerintah yang berdaulat

Tentu kita akan membicarakan, apa saja yang sudah kita kerjakan, apa yang belum, apa yang harus kita segera akselerasikan kita percepat, kalau kita kasih gambaran ada 29 hari ini sehingga ada 3 tahapan atau bagian besar

Bagian pertama, kita harus 75%, sehingga 25% pada tahapan kedua serta finish 3 bagian terakhir sehingga nanti kita lihat dan apa-apa saja yang kurang termasuk kita menentukan apa saja kontijensi

Dalam peran pemerintah dan Pemda dalam pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024, didasarkan pasal 434 UU No. 7/2017 tentang pemilu, yakni:

1. Penugasan personel pada Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS,
2. Penyediaan sarana ruangan Sekretariat PPK, Panwaslu Kecamatan dan PPS,
3. Pelaksanaan sosialisasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu,
4. Pelaksanaan pendidikan politik, bagi pemilih untuk meningkatkan partisipasi masyarakat,
5. Kelancaran transportasi pengiriman logistik pemilu dan
6. Pemantauan kelancaran penyelenggaraan pemilu dan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan pemilu

Untuk jumlah wajib pilih di Sulawesi Tenggara, berdasarkan hasil rapat pleno terbuka KPU 1.867.931 orang ditetapkan sebagai wajib pilih terdiri dari pemilih laki-laki 931.298 dan pemilih perempuan 936.633 dan pastikan seluruh masyarakat menyelenggarakan hal pilihnya dengan aman, tanpa tekanan dari pihak manapun dan terjaga kerahasiannya

Selanjutnya, jumlah penyelenggaraan Badan Adhoc se-Sultra yaitu 17 Kab/Kota, 221 Kec, 2.285 Desa/Kel, TPS 8.154. Serta panitia pemilihan kecamatan 1.105, Sekretariat Panitia pemilihan kecamatan 663, panitia pemungutan suara 6.855, sekretariat panitia pemungutan suara 6.855 dan 57.078 kelompok penyelenggaraan pemungutan suara

Badan Adhoc di Sultra telah dibentuk, berdasarkan PKPU No.

8/2022, untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung-jawab, kepada seluruh anggota badan adhoc agar selalu jaga kesehatan. Kata Pj. Gubernur Sultra

Lanjut, aparat keamanan agar terus lakukan persiapan matang, lakukan koordinasi dengan baik di daerah-daerah rawan konflik, dan lakukan komunikasi yang intens dengan para tokoh masyarakat setempat dalam rangka mewujudkan pemilu yang aman, damai dan tanpa cela

Oleh karna itu, yang telah laksanakan kerjasama dengan BPJS ada KPU Kab.Kolaka, yang sedang proses kerjasama KPU Kota Kendari, KPU Kab. Koltim dan yang belum laksanakan kerjasama dengan BPJS KPU Kab. Bombana, Kota Bau-Bau, Kab. Buton, Kab. Busel, Kab. Buteng, Kab. Butur, Kab. Kolud, Kab. Konawe, Kab. Konkep, Kab. Konsel, Kab. Konut, Kab. Muna, Kab. Mubar, Kab. Wakatobi dan KPU Kota Bau-Bau

"saya titip siapkan segala sesuatunya dengan baik, dan penuh hak-hak konstitusional sudah diatur dalam pembukaan UUD RI pada alinea ke-4, serta saya juga berpesan kepada KPU Kab/Kota termasuk Bawaslu melakukan akselerasi kerjasama, dengan BPJS dengan wilayah masing-masing" Ucap Pj. Gubernur Sultra

Untuk kelengkapan logistik pemilu 2024,

Yusril Sebut Rencana Pemakzulan Tak Akan Berhasil Tanpa Dukungan DPR



Yusril Ihza Mahendra

Laporan: Hadi

JAKARTA -- Pakar Hukum Tata Negara Yusril Ihza Mahendra menyebut wacana memakzulkan Presiden Joko Widodo tidak akan berhasil jika tak mendapat dukungan dari DPR.

"Ya kalau sekarang tiba-tiba mau ada pemakzulan, ya tanpa dasar yang jelas dan dukungan dari DPR, saya kita itu tidak akan ada dampak ke Presiden sendiri," kata Yusril di Bareskrim Polri, Senin (15/1).

Yusril menerangkan bahwa pemakzulan terhadap Presiden diatur dalam Pasal 7B UUD 1945.

Merujuk pasal itu, kata dia, pemakzulan bisa dilakukan jika Presiden dinilai telah melakukan pengkhianatan terhadap negara, melakukan korupsi, melakukan perbuatan tercela dan lain-lain.

Sementara itu, Yusril mengatakan usulan pemakzulan yang diajukan oleh salah satu kelompok masyarakat tidak menyebutkan dengan jelas apa pelanggaran yang dilakukan Presiden Jokowi.

Yusril sepakat dengan Mahfud MD yang menyatakan bahwa pemakzulan itu bukan kewenan-

gan Menko Polhukam. Melainkan urusan DPR.

"Lebih baik mereka datang ke DPR dan lihat apa reaksi dari fraksi-fraksi DPR apakah mau merespons adanya pemakzulan ini atau tidak saya," ucap dia.

Yusril lantas menyinggung soal rencana hak angket terhadap Mahkamah Konstitusi (MK) yang diusulkan oleh anggota DPR RI Fraksi PDIP, Masinton Pasaribu beberapa waktu lalu.

Saat itu, Masinton mengusulkan hak angket sebagai respons atas putusan Mahkamah Konstitusi mengenai syarat capres-cawapres.

"Kalau DPR berpendapat presiden melakukan misalnya perbuatan tercela bisa menjadi dasar impeachment. Tetapi apa yang dilakukan oleh Pak Masinton hilang begitu saja," kata dia.

Beberapa waktu lalu, sekelompok tokoh yang tergabung dalam Petisi 100 mendatangi Menko Polhukam, Mahfud MD. Sekitar 22 tokoh yang tergabung dalam kelompok tersebut mendatangi Mahfud menyampaikan permintaan mengenai pemakzulan Jokowi.

Beberapa tokoh

tersebut antara lain, Faizal Asegaf, Marwan Batubara, Rahma Sarita, dan Letnan Jenderal TNI Mar (Purn) Suharto. Para tokoh tersebut berharap Pemilu 2024 diselenggarakan tanpa Jokowi di kursi presiden.

Terbaru, Ketua Fraksi PAN di DPR Saleh Daulay menganggap wacana pemakzulan itu tidak punya dasar yang jelas.

Alih-alih pelanggaran, Jokowi justru disukai publik atas kinerjanya selama ini. Saleh menyampaikan hasil survei kepuasan publik atas kinerja pemerintah.

Saleh menilai permintaan pemakzulan Jokowi hanya sekadar mencari sensasi di tengah dinamika politik menjelang pemilu. Isu pemakzulan tersebut dinilai memiliki muatan politik yang sangat tinggi.

"Sudah selayaknya diabaikan dan tidak ditanggapi. Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam perjalanan demokrasi dan tata negara kita," ujarnya.

"Jangan sampai ini menjadi preseden buruk dalam perjalanan demokrasi dan tata negara kita. Jangan hanya karena perbedaan pilihan politik, lalu mengusulkan dan menggagas pemakzulan," ucapnya. (*)

didasarkan PKPU No. 14/2023 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 16/2023 tentang perubahan atas per KPU nomor 14 tahun 2023 yaitu: 1. Perlengkapan pemungutan suara, 2. Dukungan perlengkapan lainnya dan 3. Perlengkapan pemungutan suara lainnya

Kita perlu perhatikan skala prioritas, dalam

Penyaluran logistik pemilu, yaitu: waktu tempuh, jarak tempuh, beban penyaluran, letak geografis dan tingkat kesulitan medan, kondisi, iklim dan cuaca, sarana transportasi dan tingkat kerawanan menuju tempat tujuan

Terakhir, saya berharap Rakor ini dapat menghasilkan kese-

pakatan yang konkret dan solutif untuk peningkatan kualitas penyelenggaraan pemilu dan pilkada di masa yang akan datang dan mari bersama-sama kita wujudkan pesta demokrasi yang berkualitas dan memberikan manfaat terbaik bagi rakyat Sulawesi Tenggara dan dilanjutkan dengan diskusi. (*)

Jadi Irup Peringatan Bulan K3 Nasional,
Ini Pesan Pj Gubernur Sultra ABR



Pewartu: Mashuri

SULTRA, BP- Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H, jadi Inspektur Upacara (Irup) pada peringatan bulan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Nasional Tahun 2024 di Halaman Kantor Gubernur Sultra, (Senin, 15 Januari 2024)

Hadir dalam kegiatan tersebut Forkopimda Sultra diwakili, Danrem 143 Haluoleo, Sekda Sultra, Staf Ahli Gubernur, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Ketua Pengadilan Tinggi Sultra, Ketua Pengadilan Agama Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra, Kepala BIN Daerah Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo Kendari atau yang diwakili, Kepala Kantor Badan Pemeriksaan Keuangan Perwakilan Sultra, Perwakilan Kantor BI, Kakanwil Kemenkumham, Para Kepala OPD lingkup Pemprov. Sultra, BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, Para Pimpinan Perusahaan dan pejabat terkait

Pj. Gubernur Sultra didampingi Sekda dan Kadis Transmigrasi dan Tenaga Kerja Prov. Sultra, menyerahkan penghargaan dan bantuan ahli waris dari Pemerintah Prov. Sultra melalui Dinas Transmigrasi Sultra, kepada PT. DSSP Power Kendari atas pencapaian penetapan jumlah jam kerja kecelakaan nihil sejak bulan September 2016- Desember 2023 selama 10 juta jam kerja, PT. Putra Perkasa Abadi jumlah jam kerja nihil bulan Januari 2021- samapai dengan Desember 2023 sebanyak 7.500 juta jam kerja dan PT. Apollo Nickel Indonesia, mencapai jumlah jam kerja kecelakaan nihil sejak bulan Jan-

uari 2021- Desember 2023, selama 2 Juta Jam Kerja, kepada ahli waris non ASN yaitu Keluarga Swesti, Keluarga Pidnur dan Keluarga Ridwan

Kemudian Pj. Gubernur Sultra membacakan Sambutan Menteri Ketenagakerjaan RI, Ida Fauziyah, memyamilikan bahwa memperingati Bulan K3 Nasional yang diselenggarakan serentak di seluruh tanah air dengan mengusung tema "Budayakan K3, Sehat dan Selamat dalam Bekerja, Terjaga Keberlangsungan Usaha"

Dalam peringatan bulan K3 nasional tahun 2024 ini, alhamdulillah status pandemi Covid-19 telah dicanit oleh pemerintah dan kita memasuki masa endemic Covid-19. Indonesia mendapatkan apresiasi sebagai salah satu, negara yang berhasil mengatasi pandemi dan memulihkan ekonomi dengan cepat

Oleh Karna itu, pembangunan ekosistem ketenagakerjaan yang unggul, tidak hanya mengusung regulasi yang baik di bidang ketenagakerjaan, namun yang tidak kalah penting adalah meningkatkan pemahaman dan kesadaran kepada seluruh pihak dalam menerapkan norma ketenagakerjaan

Salah satu kunci penting dari pembangunan ekosistem, ketenagakerjaan yang unggul adalah dengan membangun budaya Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) yang baik. Dengan adanya budaya K3 yang unggul, maka angka kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja akan dapat ditekan, yang pada akhirnya diharapkan mampu meningkatkan produktivitas kerja

Keberhasilan program K3 akan menekan kerugian, meningkatkan kualitas hidup dan indeks pembangunan manusia, sangat mem-

bantu menunjang pembangunan nasional, meningkatkan data saing nasional untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan, serta peningkatan daya saing nasional di era global

Di tingkat internasional, Indonesia telah membuat komitmen yang sangat kuat untuk mewujudkan pekerjaan layak dan memainkan peranan penting guna memastikan bahwa persoalan ketenagakerjaan dan tenaga kerja dimasukkan dalam sustainable Development Goals (SDGs)

Berdasarkan laporan tahunan BPJS Ketenagakerjaan 3 (tiga) tahun terakhir, data jumlah kecelakaan kerja (termasuk diantaranya penyakit akibat kerja/PAK) diketahui terus meningkat. Pada tahun 2021 angka kecelakaan kerja berjumlah 234.371 kasus, kemudian pada tahun 2022 angka kecelakaan kerja 298.137 kasus, sedangkan yang terbaru pada tahun 2023 (sampai dengan bulan Oktober) jumlah kecelakaan kerja tercatat sebesar 315.579 kasus (data keseluruhan tahun 2023 batu dapat ditarik pada awal Januari 2024).

Kementerian Ketenagakerjaan telah menetapkan sembilan lompatan besar Kementerian Ketenagakerjaan sebagai terobosan strategis guna mengoptimalkan potensi pembangunan, serta mengatasi tantangan dan permasalahan ketenagakerjaan yang semakin kompleks. Salah satu lompatan dimaksud yaitu reformasi pengawasan ketenagakerjaan. Sebagai wujud implementasi reformasi pengawasan Ketenagakerjaan dan pelaksanaan K3 secara nasional, Kementerian Ketenagakerjaan telah melakukan berbagai upaga, di antaranya yaitu: 1. Penyusunan dan pembaharuan norma, standar, kriteria dan prosedur bidang K3, 2. Meningkatkan pembinaan dan penga-

ABR Lantik Pj Bupati Kolaka Dr Andi Makkawaru Iza Zarny JaSSIN



Pewartu: Lisna

SULTRA, BP-Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra), Komjen Pol. (P) Dr. (H.C) Andap Budhi Revianto, S.I.K., M.H., melantik Pejabat (Pj) Bupati Kolaka, Dr. Andi Makkawaru Iza Zarny Jassin, ST., M. Si yang sebelumnya menjabat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sultra diruang Pola Lantai 3 Kantor Gubernur Sultra, (Senin, 15 Januari 2024)

Hadir dalam pelantikan tersebut, Ketua DPRD Sultra, Forkopimda tingkat 1, Danrem 143 Haluoleo, Kabinda Sultra, Ketua Pengadilan Agama Sultra atau yang diwakili, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sultra, Kejaksaan Tinggi Sultra, Danlanal Kendari, Danlanud Haluoleo, Bupati Kolaka pada masanya, Plt. Bupati Kolaka tahun 2023-2024, Forkopimda tingkat 2 Kab. Kolaka dan Pejabat terkait

Pembacaan SK Pelantikan oleh Kepala Biro Pemerintah dan Otonomi Daerah Setda Sultra, Muliadi, Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (Mendagri RI)

wasan Ketenagakerjaan termasuk Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), 3. Meningkatkan penguatan profesionalisme pengawasan ketenagakerjaan dan penguji K3., 4. Memberikan pelayanan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja (K3) secara optimal, 5. Meningkatkan kesadaran pengusaha/pengurus, tenaga kerja dan masyarakat sehingga me-

Nomor: 100.2.1.3-71 Tahun 2024 tentang pengangkatan Pejabat Bupati Kolaka Prov. Sultra

Pj. Gubernur Sultra melantik Pj. Bupati Kolaka, dengan pengucapan sumpah dan janji jabatan, dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara, pakta integritas dan penyematan tanda jabatan serta penyerahan surat keputusan Mendagri RI kepada pejabat yang dilantik

Sambutan Pj. Gubernur Sultra, kita tadi pertama mendengar lagu Indonesia Raya berarti kita ada proses internalisasi dalam konsep bernegara, berbangsa dalam mengimplementasikan sehingga kewaspadaan dan ketahanan nasional tetap kuat

Kedua, kita mendengarkan doa-doa yang terbaik dari rohaniawan, kemudian kita melihat dan mendengarkan kata-kata pelantikan dan integritas termasuk pakta integritas

Tentu kita harus menjaganya dengan baik, dengan cara bekerja dengan ikhlas dan tanpa pamrih, karna sebagai Pj. Bupati harus memberikan contoh dan inspirasi kepada bawahannya, serta menjadi solusi termasuk juga

koreksi bagi pelaksanaan di lapangan bermula bagaimana kita mencontohkan

"Saya menyampaikan selamat atas amanah tugas barunya semoga dimudahkan, dilancarkan, diberi kerjakan dan senang berkah dan senang biasa berada didalam perlindungan Allah SWT" Ucapan Pj. Gubernur Sultra

Bagaimana kita menjaga marwah dan kehormatan institusi terutama Kab. Kolaka, kita harus menjaga marwah keluarga dan tetap sesuai apa yang diamanahkan oleh ketentuan dan kepercayaan pimpinan dan juga harapan masyarakat

Lanjut, atas kerja keras dan dedikasi, pengabdian kepada wakil bupati Kolaka yang selanjutnya menjadi Pelaksana Tugas Bupati (Plt) Kab. Kolaka, H. Muhammad Jayadi, terhitung mulai tanggal 06 Oktober 2023-14 Januari 2024, terima kasih dan sampaikan salam hangat kepada keluarga

Secara khusus kepada Pj. Bupati Kolaka yang baru, jabatan ini adalah amanah, kebanggaan dan kehormatan, tetapi dibalik semua itu ada tanggungjawab besar sehingga ada prosedur yang harus dilakukan dengan sebaik-bai-

nya

Saya ingatkan kembali sebagai Pj. Bupati termasuk mengingat diri saya sendiri bahwa selalu ASN adalah pelayan masyarakat sehingga masyarakat berasa dalam posisi yang tinggi kita melayani masyarakat

Bagaimana kita intens memonitor, berbagai hal yang ada di masyarakat kita adalah bagian dari solusi terhadap berbagai permasalahan, kita kawal kebijakan nasional dalam rangka pembangunan nasional di Kolaka

Juga perhatikan Agenda dari Januari-Desember nanti, sebut saja 29 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi, sebagaimana diatur dalam UUD no.7 tahun 2017 ini adalah segregasi atau pemilahan yang di masyarakat yang terjadi

Sehingga tugas kita adalah mereduksi, mengeliminir berbagai potensi ataupun kerawanan yang ada di masyarakat. Pada dasarnya kita adalah satu, jangan sampai terpecah, kita satu jangan sampai terpecah, beda pandangan, beda orientasi, beda pilihan, ada satu kekuatan yang besar intinya adalah kita tetap Netral. (*)

Selesai membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan dilanjutkan sambutan Pj. Gubernur Sultra yaitu: pertama mari ke depan untuk disiplin, karena saya menganggap hal ini signifikan dan penting sekali di

dalam membangun moral dan akhlak kita, dalam membangun disiplin dan integritas

Dari data tahun ke tahun di tempat kita, ada peningkatan yang signifikan pada 2021 terjadi kecelakaan kerja, pada 60 perusahaan sama dengan data nasional tadi. Kemudian yang kedua, 2022 meningkat menjadi 110 perusahaan dan ketiga 2023 naik menjadi 120 perusahaan. (*)

Selesai membacakan sambutan Menteri Ketenagakerjaan dilanjutkan sambutan Pj. Gubernur Sultra yaitu: pertama mari ke depan untuk disiplin, karena saya menganggap hal ini signifikan dan penting sekali di

Pj. Bupati Buton La Ode Mustari Ikuti Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Pj. Bupati Buton, Drs. La Ode Mustari, M.Si. mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Inflasi yang dipimpin langsung Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D. secara virtual di Ruang VIP Kantor Bupati Buton, pada Senin, 8 Januari 2024.

Turut hadir dalam Rakor tersebut Sekretaris Daerah Kabupaten Buton As-

nawi Jamaluddin, S.Pd., M.Si., unsur Forkopimda perwakilan dari Kejaksaan Negeri Buton, Kepala BPS Buton Zablin, S.ST. dan para kepala OPD terkait.

Dalam arahannya Mendagri mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia berada di posisi terbaik. "Dari 186 negara kita di urutan 52 negara dengan inflasi terendah," ujarnya.

Ia menambahkan, inflasi di bulan Desember sebesar 2,61%, turun dibandingkan dengan bu-

lan November 2023, yakni 2,86%.

"Harapannya kita tidak ada kegiatan besar di bulan Januari, sehingga sektor transportasi dan rekreasi akan menurun, dan kita kembali fokus ke makanan, minuman, dan tembakau," jelasnya.

Mantan Kapolri ini pun mengingatkan agar semua daerah jangan terlena dengan inflasi yang relatif terkendali, terutama kepada daerah yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH).(*)

Ketua TPPS Buton Bakal Gelar Rakor Stunting secara Rutin



Pewarta: Rahman

BUTON, BP-Ketua Tim Percepatan penurunan Stunting Kabupaten Buton yang Sekretaris Daerah Kabupaten Buton, Asnawi Jamaluddin, SPd, MSi bakal menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Stunting secara rutin. Rakor akan membahas rencana aksi, termasuk kendala di lapangan dalam percepatan penuruna angka stunting di

Kabupaten Buton.

Hal itu dikatakan Jenderal ASN Kabupaten Buton usai menghadiri Penyampaian Tanggapan serta Rencana Aksi atas Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Pemerintah Daerah dalam Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting Tahun Anggaran 2022 dan 2023 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara, Kendari, Kamis, 21

Desember 2023.

Pada kesempatan itu, Sekda didampingi langsung Inspektur Kabupaten Buton, Drs. Gandid B. Sioni, Kepala Bappeda Kabupaten Buton, Drs Awaluddin, Plt Kadis Pengendalian Penduduk dan KB, 12 OPD Anggota TPPS "TPPS nantinya menggelar rakor bersama OPD terkait yang akan melibatkan pihak ketiga yang menjadi mitra

Pimpin Apel Gabungan, Pj Bupati Buteng Andi Muh Yusuf Sampaikan Beberapa Hal Penting



Laporan: Ardi

BUTENG, BP-Pj Bupati Buton Tengah (Buteng), Andi Muhammad Yusuf pimpin Apel Gabungan, di halaman kantor Bupati Buton Tengah, Senin (15/1/2024).

Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf dalam arahnya menyampaikan beberapa hal penting, pertama mengucapkan terima kasih kepada seluruh OPD atas pencapaian kinerja di tahun 2023.

"Dengan masuknya tahun baru 2024, tentu banyak hal yang harus di persiapkan, tantangannya semakin berbeda, semakin kompleks atas semua tuntutan yang dibebankan kepada kita khususnya para ASN," kata Pj Bupati.

Kedua, hal yang ditekankan oleh Pj Bupati, Andi Muhammad Yusuf terkait kegiatan Musrembang.

"Kepada para perencana masing-masing OPD untuk diperhatikan kegiatan di tahun 2025. Dipetakan mana yang menjadi program prioritas untuk dimasukkan dalam dokumen

perencanaan", jelasnya.

Hal ke tiga yang disampaikan oleh Pj Bupati adalah menyangkut Ikrar Pemilu 2024. "Selaku ASN untuk taat aturan sesuai dengan mekanisme undang-undang yang berlaku. Terlepas dari itu ada konsekuensi kalau melanggar dan jelas aturannya", ungkapnya.

Ia menuturkan, ada lembaga khusus yang memantau semua dalam pelaksanaan Pemilu.

"Saya berharap, kita semua menjadi contoh yang baik di tengah-tengah masyarakat, memberikan edukasi, pengertian kepada masyarakat. Saya berterima kasih kepada kondisi saat ini minus 30 hari pelaksanaan Pemilu 2024, kondisi Buton Tengah masih dalam keadaan aman terkendali. Untuk itu peran para ASN sangat berpengaruh untuk memberikan penjelasan hal-hal informasi yang positif, khususnya di keluarga kita masing-masing", tegasnya.

Ia menambahkan, kepada para ASN untuk

saling mengingatkan. Bekerja saja sesuai dengan tugas yang di prioritaskan untuk pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Berikan pendidikan politik yang baik di tengah keluarga, memberikan pemahaman dan informasi yang baik.

"Bantu penyelenggara Pemilu dari aspek partisipasi dalam penyelenggaraan Pemilu, Buton Tengah menjadi daerah yang menjadi barometer dalam kegiatan-kegiatan positif yang menyangkut Pemilu khususnya tingkat partisipasi masyarakat", jelasnya.

Hal berikut yang disampaikan oleh Pj Bupati, adalah mengenai disiplin ASN menjadi hal yang terus ditingkatkan.

"Ada hal yang membanggakan khususnya di Buton Tengah atas penilaian hasil Pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang dikeluarkan oleh Kementerian PANRB memperoleh penilaian

baik Dari 17 Kab/Kota dan Provinsi Sultra.

Hal terakhir yang disampaikan oleh Pj Bupati Buteng terkait Stunting. 2024 adalah tahun terakhir pencapaian target pemerintah pusat, minimal di angka 14%.

Pencapaian kita sampai dengan Bulan Oktober-November 2023, surfei tingkat partisipasi masyarakat sudah mencapai 15,7%.

"Saya yakin dan percaya dengan kerjasama yang baik di tahun 2024 angka ini bisa di tekan. Untuk itu kepada para OPD yang menangani untuk menaruh harapan besar untuk bersama-sama mencari formasi percepatan kegiatan agar Buton Tengah terlepas dari daerah yang angka Stuntingnya cukup besar. Saya mengajak kepada kita semua untuk menjaga kesehatan, menjaga diri, muda-mudahan diawal tahun ini bisa memberikan motifasi, sesuatu yang hal yang baik khususnya bagi daerah kita di Buton Tengah", tutupnya. (*)

TPPS selama ini guna membahas program penanganan stunting secara menyeluruh dalam aksi konvergensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Buton," kata

Sekda.

Sekda berharap bagi OPD terkait untuk secara serius menangan stunting sesuai dengan tupok-sinya masing-masing. Rakor juga digunakan sebagai wadah evaluasi pelaksanaan

penurunan stunting dengan medomani pada 8 aksi konvergensi dalam penurunan stunting.

"Selain itu kita juga akan memonitor kegiatan yang telah dilakukan masing pihak atau OPD terkait

dalam penanganan stunting. Selama ini rakor rutin dilakukan oleh Tim Penanggulangan inflasi daerah (TPID) setiap hari Senin. TPPS juga akan melakukan hal serupa," tegas Sekda. (*)

Tingkatkan Kerja Sama Industri dengan SMK, BBPPMPV BMTI Selenggarakan Gebyar Karya Vokasi



Laporan: Yeti

CIMAH, BP- Kolaborasi menjadi pilar penting pendidikan vokasi. Dalam rangka merayakan hasil kolaborasi dan meningkatkan kerja sama antara sekolah menengah kejuruan (SMK) dengan industri, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri (BBPPMPV BMTI) menyelenggarakan Gebyar Karya Vokasi BBPPMPV BMTI Tahun 2023.

Kegiatan yang diselenggarakan pada 26-28 Desember 2023 tersebut memiliki tema "Peningkatan Kerja Sama Vokasi" dan "BBPPMPV BMTI Awards". Gelar Karya Vokasi ini merupakan bagian dari presentasi hasil karya pelatihan yang dibuat untuk mengembangkan edukasi, apresiasi, dan kolaborasi yang positif dari mitra BBPPMPV BMTI dalam meningkatkan kemampuannya dalam berkarya.

Direktur Sekolah Menengah Kejuruan, Wardani Sugiyanto, turut membuka acara Gebyar Karya Vokasi BBPPMPV BMTI Tahun 2023. Dalam sambutannya, Wardani

meni mengatakan bahwa pendidikan vokasi tidak akan sukses tanpa adanya kolaborasi dengan industri. "Untuk itulah, kita menaruh harapan yang besar untuk penyelarasan pendidikan vokasi dengan industri," ungkap Direktur Wardani dalam sambutannya di Balai Pancaniti, BBPPMPV BMTI, Cimahi, Jawa Barat, pada Rabu (27/12).

Wardani pun menekankan kepada industri agar bersama-sama membangun pendidikan vokasi di Indonesia. Menurut Wardani, melalui kegiatan Gebyar Karya Vokasi menjadi langkah strategis yang sudah ditempuh BBPPMPV BMTI karena sudah memfasilitasi kerja sama antara industri dengan satuan pendidikan vokasi, khususnya SMK.

"Mari kita optimalkan lagi kerja sama dengan industri. Kegiatan ini pun bisa menjadi refleksi untuk rencana dan meningkatkan capaian tahun depan," tutur Wardani.

Dalam kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala BBPPMPV BMTI, Supriyono, dalam laporannya menyatakan bahwa

BBPPMPV BMTI berkomitmen untuk memberikan fasilitas penyelarasan industri, baik melalui pelatihan program Upskilling dan Reskilling Guru Vokasi maupun bentuk kerja sama lainnya.

"Terhitung sejak tahun 2023, terdapat 242 industri yang sudah melakukan kerja sama dengan BMTI dan SMK dengan melakukan pepadanan industri. Angka tersebut meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 168," ujar Supriyono.

Melalui laporannya tersebut, Supriyono pun menyampaikan bahwa momentum kolaborasi dengan industri perlu ditingkatkan kembali sehingga dapat berdampak lebih besar kepada pembelajaran di SMK. Kegiatan ini pun terdiri atas pameran hasil pembelajaran berbasis proyek atau project based learning (PBL) SMK dan industri, pameran PBL produk pelatihan dari BMTI, serta BMTI Awards.

Puncak acara kegiatan ini pun di meriahkan dengan BBPPMPV BMTI Awards. BMTI Awards diberikan

kepada para mitra BBPPMPV BMTI yang telah bersinergi dan berkolaborasi dalam menjalankan semua program-program yang telah dicanangkan dan dilaksanakan di BBPPMPV BMTI.

Menurut Supriyono, BBPPMPV BMTI memandang penting untuk memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pihak-pihak yang telah bekerja sama, bersinergi, dan berkolaborasi dengan baik di sepanjang tahun 2023.

BMTI Awards diberikan dalam beberapa kategori, yaitu Kategori Apresiasi bagi SMK, Kategori Apresiasi bagi Industri, dan Kategori Apresiasi bagi Program Keahlian," terang Supriyono.

Salah satu industri yang berkontribusi besar terhadap pelatihan guru vokasi ialah PT Pindad, Bandung. PT Pindad berhasil meraih peringkat 1 sebagai industri dengan kontribusi terbanyak pada Program Pemagangan Pelatihan Guru dan Kepala Sekolah.

Pada kesempatan tersebut, Senior Officer Pengelola Pembelajaran dan Sertifikasi PT Pindad,

Menkes Apresiasi RSUD Haji Surabaya yang Sukses Integrasikan Layanan ke SatuSehat



Laporan: Amran

SURABAYA - Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin mengapresiasi RSUD Haji Surabaya yang mampu mengintegrasikan sistem teknologi informasi (IT) ke SatuSehat.

Menkes Budi mengatakan kedatangannya ke RSUD Haji ingin melihat sistem IT yang terintegrasi dengan SatuSehat. Integrasi itu membuat RSUD Haji setara dengan rumah sakit-rumah sakit besar vertikal milik Kemenkes.

"Jadi, saya ingin lihat itu sebenarnya. Saya kagum karena ini (integrasi ke SatuSehat) dibikin oleh tenaga-tenaga dari RS Haji sendiri," ujar Menkes Budi, Sabtu (13/1/2024).

Rumah Sakit Haji sudah mengintegrasikan datanya di bagian rawat jalan. Dengan demikian,

data kunjungan, data diagnosa, dan tanda-tanda vital pasien sudah terintegrasi ke SatuSehat.

Pada 2024 ini, RS Haji akan mengintegrasikan data kefarmasian mulai dari resep obat dan penjualan obatnya. Saat ini, progres integrasi data kefarmasian itu sedang proses pemetaan atau mapping. Ke depan, RS Haji juga akan mengintegrasikan layanan radiologi dan layanan kesehatan lainnya.

Setelah melihat infrastruktur dan fasilitas di RS Haji, Menkes Budi berharap Kemenkes dapat membantu memodernisasi suatu RS Haji sendiri," ujar Menkes Budi, Sabtu (13/1/2024).

Rumah Sakit Haji sudah mengintegrasikan datanya di bagian rawat jalan. Dengan demikian,

an untuk masyarakat umum, dan Rumah Sakit Haji ini harus memastikan bahwa jemaah haji kita tuh sehat, karena kematian dari jemaah haji Indonesia itu paling tinggi daripada jemaah haji dari semua negara di dunia," ucap Menkes Budi.

Bahkan, lanjutnya, banyaknya jumlah kematian jemaah haji Indonesia disampaikan langsung oleh menteri kesehatan Arab Saudi kepadanya. Jika kondisi ini terus berlangsung, kuota jumlah jemaah haji dari Indonesia kemungkinan akan dikurangi.

"Kita harus memperbaiki itu, gimana caranya semua rumah sakit harus bisa memastikan bahwa sebelum mereka (jemaah haji) berangkat posisinya harus sehat," tutur Menkes Budi. (*)

Muhammad Zulfikar, menyampaikan bahwa industri yang bergerak di manufaktur tersebut pun telah bekerja sama dengan BMTI sejak tahun 2019.

"Kami membantu dalam pelaksanaan pemagangan dan pelatihan guru serta kepala sekolah untuk bidang teknik logistik, pengelasan, kelistrikan, dan

pemesinan," ungkap Zulfikar.

Di sisi lain, SMKN 1 Cimahi pun sukses meraih penghargaan sebagai SMK Pelaksana Cyber Vokasi Terbaik. Agus Priyatmono Nugroho selaku Kepala SMKN 1 Cimahi menjelaskan bahwa SMK yang dipercaya melaksanakan pelatihan cyber vokasi selama 2023.

"Pelatihan yang dilaksanakan di SMKN 1 Cimahi yaitu tentang internet of things (IoT) dengan berdampak pada puluhan guru dengan pembuatan alat pengendali secara otomatis," ungkap Agus.

Selain dua kategori tersebut, BMTI pun memberikan penghargaan tambahan kepada industri dan SMK lainnya. (Kemendikbud)

Baubau Post
 Kritik, Lugas, Independen
 Wartawan Baubau Post tidak menerima imbalan dalam bentuk apa pun saat melakukan tugas jurnalistik
 Dalam pelaksanaan tugas, wartawan Baubau Post dibekali tanda pengenal. Untuk itu masyarakat yang mencurigai seseorang yang mengatasnamakan Baubau Post, segera menghubungi Kantor Redaksi Surat Kabar Baubau Post
 Segala Berita yang diterbitkan oleh Baubau Post merupakan tanggungjawab penanggungjawab Redaksi

Pemimpin Umum : Fauzan NWA
 Penanggung Jawab/Pemimpin Redaksi : Ardi
 Redpel : Hengky TA
 Korlip : Hengky T.A
 Redaktur : Alyakin, Kasrun
 Reporter : R a h m a n , ,mashuri, Jaya, Azis, , Lisma

Layouter : Ririn
 Pracetak : Aditya
 Cetak : Jamal

Alamat Redaksi/ Tata Usaha : Jl. Raya Palagimata, BTN Palagimata, Blok K-L No. 1 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau
 Tlp. 0402-2814207 - Email : baubaupost2019@gmail.com
 Percetakan : PT. Faren Grafika, Alamat: Jl. Raya Palagimata Blok K No 01, Kel. Lipu, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau

Penerbit : PT. Faren Grafika
 Komisaris : Erna Agule
 Direktur Utama : Andina Latief, SKM
 Manager Keuangan : Nabila D.A
 Manager Iklan dan Pemasaran : Fauzan
 Kepala Sirkulasi : Jamal
 Administrasi : Salvana
 Security :

Kepala Biro Wakatobi : Risman
 Kepala Biro Buton Utara : Fauzan
 Kepala Biro Buton : Rahman
 Kepala Biro Busel : Salvana
 Kepala Biro Buteng : Andini
 Kepala Biro Bombana :
 Kepala Biro Sultra :

Kontributor Baubau : Iphul, Kontributor Sultra : Amat Jr
 Kontributor Buton : Kontributor Butur : Kasrun,
 Kontributor Buteng : Hengki TA, Kontributor Busel : Amirul

Baubau : Jaya
 Agen Pasarwajo :
 Agen Butur : Samrihan

Harga Langganan : Dalam Kota Baubau Rp. 100.000,-/ bulan,
 Luar Kota Baubau + Ongkos Kirim,
 Eceran Dalam Kota Baubau : Rp.5.000,-

Yusril Nilai Kasus Dugaan Pemerasan Firli Banyak Kejanggalan



Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra meminta kasus dugaan pemerasaan oleh Firli Bahuri dihentikan lantaran dinilai banyak kejanggalan.

Laporan: Hamid

JAKARTA-- Pakar hukum tata negara Yusril Ihza Mahendra mengatakan banyak kejanggalan dalam kasus dugaan pemerasaan terhadap eks Mentan Syahrul Yasin Limpo (SYL) dengan tersangka eks Ketua KPK, Firli Bahuri. Karenanya, Yusril meminta agar kasus ini dihentikan.

"Sebenarnya kasus ini sebaiknya dihentikan. Bisa dihentikan lewat praperadilan, bisa juga dikeluarkan SP3," kata Yusril kepada wartawan di Bareskrim Polri, Senin (15/1).

Apalagi, kata Yusril, dalam gugatan praperadilan yang diajukan pihak Firli, pengadilan menyatakan tidak dapat diterima, bukan ditolak.

"Artinya hakim tidak masuk ke perkara karena eksepsi dari termohon PMJ diterima yaitu permohonan praperadilannya, itu mencampurkan antara formulir dan materiel padahal praperadilan itu hanya forumnya saja, karena itu dianggap permohonan itu tidak jelas," ujarnya.

Yusril menyebut kejanggalan dalam kasus ini juga terlihat dalam proses penyelidikan hingga penyidikan. Bahkan, lanjut dia, bukti yang dikumpulkan polisi pun belum bisa membuktikan dugaan tindak pidana yang terjadi.

"Saksi yang diperiksa, tidak satu pun menerangkan bahwa memang ada kata-kata atau perbuatan yang mengancam Pak Yasin supaya merasa dia diperas, kan enggak ketemu ya, sampai hari ini belum ada buktinya," ucap dia.

Yusril hari ini hadir untuk memenuhi

panggilan pemeriksaan sebagai saksi a de charge atau meringankan bagi Firli di kasus dugaan pemerasaan. Yusril tiba di Gedung Bareskrim Polri sekitar pukul 10.35 WIB dan saat ini proses pemeriksaan masih berlangsung.

Yusril juga mengaku khawatir kasus Firli Bahuri bisa menimbulkan kegaduhan. Bahkan, dikhawatirkan bisa berdampak pada penyelenggaraan Pemilu 2024. Yusril menyebut menetapkan seorang Ketua KPK sebagai tersangka bukan hal sederhana. Apalagi, Firli juga merupakan bagian dari aparat penegak hukum.

"Dan kekhawatiran saya kalau nanti suatu saat terjadi masalah antara Mabes Polri dengan KPK seperti beberapa waktu lalu dan karena itu sangat hati-hati betul jangan sampai ini menimbulkan kegaduhan yang akhirnya akan berdampak pada pelaksanaan Pemilu yang akan dilakukan sebentar lagi," kata Yusril.

Apalagi, jika saat ini Firli masih aktif sebagai Ketua KPK. Ditambah, Firli masih punya kesempatan untuk kembali mengajukan gugatan praperadilan atas status tersangka yang disandangnya. Hal ini lantaran dalam gugatan praperadilan Firli sebelumnya, hakim menyatakan tidak dapat menerima. Bukan menolak gugatan praperadilan tersebut.

"Jadi kekhawatiran kalau sekiranya pak Firli dimenangkan praperadilannya terus kembali lagi sebagai pimpinan KPK itu kan bisa powerfull kembali. Tapi, beliau kan tidak, sudah mengundurkan diri," ucap Yusril.

Di sisi lain, Yusri

menerangkan dalam pemeriksaan hari ini dirinya sudah menyampaikan sejumlah faktor yang bisa meringankan Firli dalam kasus dugaan pemerasaan yang menjeratnya.

Kata Yusril, beberapa faktor meringankan bagi Firli itu antara lain masa dinas di Polri dan KPK hingga bersikap kooperatif selama proses penyidikan.

"Hal-hal baru yang ditanyakan kepada saya adalah betul-betul faktor yang meringankan kepada pak Firli, yang setidaknya dapat dipertimbangkan nanti oleh penyidik sehubungan dengan pemeriksaan yang sedang berlangsung pada beliau ini," tutur dia.

Pihak Firli Bahuri diketahui mengajukan empat nama untuk dijadikan sebagai saksi meringankan saat pemeriksaan pada 1 Desember lalu.

Dari keempat nama itu, dua di antaranya yakni Prof Suparji Ahmad dan Natalius Pigai. Keduanya telah dimintai keterangan pada 12 Desember.

Kemudian, juga ada Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, namun ia menolak. Posisinya kemudian digantikan oleh pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra.

Ada pula nama pakar hukum pidana, Romli Atmasasmita. Namun, ia juga menyatakan menolak untuk dijadikan sebagai saksi meringankan untuk Firli.

"Tidak bersedia saksi meringankan. Tetapi bersedia sebagai ahli," kata Romli Atmasasmita saat dikonfirmasi, Rabu (3/1).

Berkas Firli Lewati Deadline Pelimpahan Kembali, Kejati Masih Tunggu

Polda Metro Jaya telah menetapkan Firli

Sidang Dugaan Pungli 93 Pegawai KPK Digelar 17 Januari



Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan sidang etik untuk 93 pegawai KPK terkait kasus pungli di rutan, akan dibagi dalam sembilan berkas perkara.

Laporan: Hamid

JAKARTA, BP-Dewan Pengawas (Dewas) KPK dijadwalkan menggelar sidang etik terhadap 93 pegawai Lembaga Antirasuah dalam kasus dugaan pungutan liar (pungli) di rutan, pada Rabu (17/1).

Anggota Dewas KPK, Albertina Ho mengatakan sidang akan dibagi dalam sembilan berkas perkara. Enam perkara untuk 90 orang, dan tiga sisanya untuk masing-masing orang.

"Jadi yang disidangkan dalam enam berkas itu ada 90 orang, dan nanti yang tiga berkas belakangan itu masing-masing satu orang. Jadi ada tiga orang juga total 93 itu untuk kasus rutan," kata Albertina di Gedung ACLC KPK, Ja-

karta, Senin (15/1).

Sementara, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tidak akan ikut campur dan menghormati segala bentuk proses yang dilaksanakan oleh Dewas KPK mengenai pelanggaran etik 93 pegawai.

"Pimpinan KPK menghormati proses yang sedang berlangsung tersebut, karena Dewas secara profesional tentunya telah melakukan pemeriksaan kepada para pihak terkait, hingga

memutuskan untuk melanjutkannya ke tahap sidang etik," ujar Juru Bicara KPK, Ali Fikri.

Penanganan pelanggaran internal melalui penegakan etik, dugaan tindak pidana, penegakan disiplin, serta perbaikan tata kelola, kata Ali, merupakan wujud komitmen kelembagaan KPK dalam menerapkan zero tolerance terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

Dewas: KPK Kirim Petugas ke Filipina Cari Harun Masiku Tak Ketemu

Laporan: Alwan

JAKARTA- Dewan Pengawas (Dewas) KPK mengaku terus mendorong komisi antirasuah untuk mencari buron tersangka dugaan suap proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR-RI periode 2019-2024, Harun Masiku.

Ketua Dewas KPK, Tumpak Hatorangan Panggabean mengatakan pihaknya terus mendapat perkembangan dari KPK terkait pencarian Harun Masiku. Teranyar, menurut dia, KPK sempat mengirim petugas ke Filipina untuk mencari Harun, namun tak mendapat hasil.

"Semuanya dilapor-

kan kepada Dewas mereka juga ada yang berangkat ke Filipina untuk mencari Harun Masiku tapi sampai sekarang juga belum ketemu," kata Tumpak di gedung ACLC KPK, Senin (15/1).

"Jadi kami juga mendorong tiap rapat koordinasi pengawasan kami selalu tanyakan," imbuhnya.

Harun Masiku hingga kini telah buron selama empat tahun sejak ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) sebelumnya menduga Harun telah meninggal dunia.

MAKI menduga kondisi keuangan eks calon legislatif dari

PDIP itu tak memungkinkan untuk terus bersembunyi. Terlebih, kata dia, profesi yang sebelumnya dijalankan oleh Harun tak memberikan pemasukan yang cukup untuk menunjang pelariannya.

Lebih lanjut, Boyamin menyebut Harun tak mempunyai sanak keluarga yang kaya raya untuk membantu dirinya bersembunyi dari KPK.

"Karena Harun Masiku sepengetahuan saya tidak punya duit, tidak kaya lah, hidupnya biasa-biasa saja, jadi lawyer tidak hanya legal-nya Bank, kemudian jadi tenaga ahli DPR, itu enggak

Dugaan pungli di Rutan KPK kali pertama dibongkar Dewas KPK beberapa waktu lalu. Dewas melaporkan temuan tersebut kepada pimpinan KPK dan menemukan setoran Rp4 miliar yang terjadi dalam kurun waktu Desember 2021-Maret 2022.

Dewas mengungkapkan penerimaan uang pungli dilakukan satu di antaranya lewat setoran tunai dengan menggunakan rekening pihak ketiga.

Sebanyak 93 yang akan disidangkan tidak hanya diduga menerima pungli, namun ada juga yang diduga menyalahgunakan wewenang. (*)

banyak uangnya," ujar Boyamin.

KPK teranyar telah mendalami Anggota KPU periode 2017-2022 Wahyu Setiawan pada Kamis (28/12) lalu. Salah satu materi pendalaman terhadap Wahyu adalah terkait keberadaan Harun.

"Saksi hadir dan didalami pengetahuannya antara lain terkait pendalaman informasi keberadaan tersangka HM [Harun Masiku], termasuk dikonfirmasi kembali atas peristiwa pemberian suap pada saksi saat itu," ujar Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Jumat (29/12). (*)

sebagai tersangka kasus pemerasaan terhadap SYL. Ia diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU

Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Firli kemudian men-

gajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat, 24 November 2023. Namun hakim tunggal Penga-

dilan Negeri (PN) Jakarta Selatan Imelda Herawati menyatakan tak dapat menerima gugatan praperadilan Firli. (*)

Dengan Perda, Pemkot Komitmen Lindungi dan Majukan Sektor Pertanian



Pj Walikota Baubau Dr Muh Rasman Manafi

Pewarta: Andina L

BAUBAU, BP-Pemerintah Kota (Pemkot) Baubau mempunyai komitmen melindungi dan memajukan sektor pertanian melalui penyediaan lahan pangan berkelanjutan dengan memberikan pijakan hukum yang kokoh bagi pembangunan pertanian pangan berkelanjutan yakni Peraturan Daerah (Perda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan. Dan Perda tersebut sudah ditetapkan pada sidang paripurna DPRD Kota Baubau Senin (15/1/2024).

Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membacakan sambutan pada sidang paripurna DPRD Kota Baubau dengan agenda penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang lahan pertanian berkelanjutan dan Raperda tentang pengelolaan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) Kota Baubau menjadi Peraturan Daerah mengatakan, peraturan ini bukan hanya sekedar regulasi, melainkan bentuk nyata komitmen untuk melindungi dan memajukan sektor pertanian melalui penyediaan la-

han pangan berkelanjutan.

Dengan penetapan ini, diharapkan peningkatan produksi pangan, pemberdayaan petani, dan ketahanan pangan sekaligus dapat diwujudkan dengan lebih efektif di Kota Baubau.

Dr Muh Rasman berharap, Perda tentang lahan pertanian berkelanjutan diharapkan dapat menjadi pijakan bersama untuk mewujudkan tujuan-tujuan jangka panjang berupa ketahanan pangan dengan memastikan produksi yang stabil dan berkelanjutan, dukungan bagi petani untuk menerapkan praktik-praktik pertanian yang berkelanjutan seperti manajemen sumber daya yang baik, diversifikasi tanaman, pengelolaan tanah yang lestari, pengendalian erosi, dan penggunaan sumber daya air yang efisien.

Selain itu peningkatan rendemen tanaman efisiensi penggunaan input pertanian, dan penerapan teknologi modern untuk memastikan hasil pertanian yang maksimal, serta meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim dan adanya upaya untuk memelihara hayati di

ekosistem pertanian keanekaragaman diharapkan dapat kita capai dalam jangka panjang.

“Saya, selaku Walikota Kota Baubau, merasa sangat bersyukur dan terhormat dapat hadir di hadapan Bapak/Ibu sekalian pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Rumah Susun Sewa Sederhana (Rusunawa) Kota Baubau menjadi Peraturan Daerah. Izinkan saya untuk menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh anggota Dewan atas kinerja luar biasa dan dedikasinya dalam merumuskan serta membahas dua rancangan peraturan daerah yang kami yakini dapat membawa dampak signifikan bagi kemajuan Kota Baubau. Tanpa partisipasi dan keterlibatan aktif Dewan, langkah kita untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan akan sulit terwujud.”

mengetahui tata cara penanganan bahaya api. Hal tersebut dimaksudkan agar anak-anak usia dini mengetahui bahaya api yang bisa menimbulkan kebakaran jika disalah gunakan. Begitu juga dengan orang tua siswa disamping mereka dapat menjelaskan kepada anak-anak akan bahaya api mereka juga mengetahui tata cara penanganan bahaya api. Selain itu, pihaknya juga memperkenalkan bagaimana cara menyelamatkan hewan dan mem-

Dr Muh Rasman Beri Jaminan Hunian Layak Bagi Masyarakat Baubau



Pewarta: Amat Jr

BAUBAU, BP-Penetapan Peraturan Daerah (Perda) tentang Sewa Sederhana Pengelolaan Rumah Susun (Rusunawa) merupakan tonggak penting dalam upaya Pemkot Baubau menanggapi kebutuhan akan hunian yang terjangkau di tengah pertumbuhan kota yang pesat. Dengan adanya regulasi maka adanya jaminan bahwa setiap warga Kota Baubau berhak mendapatkan hunian layak tanpa harus mengorbankan kesejahteraan finansial mereka. Ini bukan hanya berarti penyediaan tempat tinggal yang aman dan nyaman, tetapi juga kontribusi terhadap pembentukan masyarakat yang inklusif dan berkeadilan.

Demikian dikatakan Pj Wali Kota Baubau Dr Muh Rasman Manafi, SP, M.Si saat membacakan sambutan pada sidang paripurna DPRD Kota Baubau terkait Raperda tentang pengelolaan rumah susun sewa sederhana (Rusunawa) Kota Baubau Senin (15/1/2024).

Menurut Dr Muh Rasman, Perda tentang Pengelolaan Rusunawa bukan hanya tentang infrastruktur fisik, melainkan juga bagaimana aturan tersebut dapat membentuk lingkungan sosial yang mendukung

dan memperkuat solidaritas di antara warga masyarakat. Ini mencerminkan pemahaman mendalam akan tantangan sosial dan ekonomi yang dihadapi masyarakat dan keinginan pemerintah untuk menciptakan kebijakan yang mempromosikan inklusivitas dan keadilan dalam penyediaan hunian.

Diungkapkan, penetapan peraturan daerah ini hanyalah awal dari suatu perjalanan yang panjang dan kompleks. Oleh karena itu, sebagai pemerintah,

akan secara cermat untuk strategis langkah-langkah menyiapkan mengimplementasikan muatan peraturan daerah ini. yakni pertama akan menyusun regulasi pelaksanaan yang rinci dan terukur untuk memastikan bahwa implementasi berjalan sesuai dengan niatan dan tujuan peraturan daerah. Kedua, pihaknya akan melibatkan berbagai pihak terkait, termasuk masyarakat, dalam proses pemantauan dan evaluasi. Dengan demikian, peraturan daerah ini tidak han-

ya menjadi sekedar teks hukum, tetapi juga dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat. Sinergi antara pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menjadi kunci keberhasilan implementasi kedua peraturan daerah ini. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk tetap menjaga komunikasi yang terbuka dan kolaboratif dengan Dewan. Kerjasama yang solid ini akan menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mencapai tujuan bersama. Stakeholder yang telah berperan aktif dalam proses penyusunan peraturan daerah ini. Dengan bekerja bersama, kami meyakini Kota Baubau akan dapat lebih efektif dalam mewujudkan kota yang berwawasan ke depan, inklusif, dan berdaya saing, ungkapnya. (*)

RA Al Hikmah Outing Class ke Damkar dan Penyelamatan

Laporan: Ardi

BAUBAU, BP-Sebanyak 73 orang siswa/siswi beserta orang tua wali murid RA Al Hikmah melakukan outing class atau siswa dan siswi RA Al Hikmah melakukan wisata edukasi ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) dan Penyelamatan Sabtu (13/1/2023).

Menurut Kepala dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang diwakili oleh Kabid Pemadam kebakaran dan penyelamatan Muhammad Assraf, tahun 2024 ini RA Al hikmah merupakan sekolah yang pertama mengajukan permohonan untuk melakukan Outing Class di Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau.

“Dan kebetulan kami mempunyai waktu maka kami menerima kunjungan dan kegiatan yang diperkenalkan kepada mereka adalah paket lengkap profesi DAMKAR, ujarnya.

Ditambahkan, kegiatan yang diikuti siswa dan siswi RA Al Hikmah adalah mengenalkan ten-



perkenalkan hewan yang harus di jauhi anak-anak karena berbahaya misalnya ular. Dirinya menganjurkan agar menghubungi Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau jika melihat ular karena sangat berbahaya bagi mereka, begitu juga jika terjadi kebakaran agar men-

ghubungi Damkar dan Penyelamatan di nomor telpon 04022821113.

Sementara itu, orang tua siswa dan siswi RA Al Himahh Alif Sukmawan sangat senang dan berterima kasih karena pihak Dinas Damkar dan Penyelamatan Kota Baubau

yang telah menerima siswa dan siswi. Apalagi, banyak hal yang anak-anak pe lajari tidak mereka dapatkan di kelas. Sehingga, inilah tujuan diadakan Outing Class agar anak-anak bisa bermain di luar ruangan dengan mendapatkan ilmu tambahan. (*)